

SISTEM PENGAWASAN INTERN ATAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PESERO),Tbk. UNIT PULO BRAYAN MEDAN

Marchelina¹, Syaharman²

¹Universitas Dharmawangsa, Indonesia
email: sundarimuza@gmail.com

²Universitas Dharmawangsa, Indonesia
email: aswinfahmi25@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to determine PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Pulo Brayan Unit Medan. The formulation of the problem in this study is how the Internal Control System for Cash Receipts and Disbursements at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Medan Pulo Brayan Unit. From the results of this study it can be seen from the total cash receipts and disbursements in 2010 that it is very clear that an internal control system is needed to avoid fraud. Internal Control System for Cash Receipts and Disbursements at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Medan Pulo Brayan Unit has not been fully effective in carrying out internal oversight of cash receipts. Seen from the duties and responsibilities carried by the teller who often performs multiple tasks, because the teller can perform the task of receiving and spending money and inputting data to the computer. This can make an oversight system ineffective. In addition, this company does not make cash deposits every day at the branch office. While the internal control system for cash disbursements has been effective because it is carried out entirely based on authorization from the branch office to determine the amount of operational costs to be incurred. Suggestions proposed by researchers for companies to make the separation of duties and responsibilities clearly to avoid any deviation from the person himself.

Keyword: Internal Control System, Receipts and Disbursements Cash

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dunia usaha sekarang ini semakin meningkat, sehingga peranan lembaga keuangan berbentuk perbankan dirasa semakin penting. Bank merupakan lembaga keuangan berbentuk perbankan yang memberikan jasa kepada masyarakat sebagai sarana untuk penyimpanan uang yang lebih aman dan sebagai sarana peminjaman (perkreditan) uang.

Proses penyetoran dan penarikan uang oleh masyarakat sangatlah berpengaruh pada laporan keuangan bank yang bersangkutan. Untuk mengetahui berapa jumlah penerimaan dan pengeluaran kas, maka bank harus membuat laporan keuangan yang efektif dan lebih relevan. Dalam membuat laporan keuangan yang efektif dan

relevan, manajemen perlu mengambil tindakan berupa pengawasan intern, karena mengingat sering terjadinya penyelewengan dalam lingkungan perusahaan terutama sering terjadi pada kas. Kas menjadi objek penyelewengan karena mempunyai sifat-sifat tersendiri bila dibandingkan dengan assetnya yaitu uang kas tersebut disukai setiap orang, kas itu mempunyai fisik yang kecil, kas mudah disembunyikan, kas sukar untuk ditandai identitas kepemilikannya. Oleh sebab itu perlu disadari bahwa tidak ada satu carapun yang menjamin tidak akan ada penyelewengan.

Dengan adanya berbagai cara untuk melakukan penyelewengan diperusahaan maka sistem pengawasan intern pada kas sangatlah diperlukan. Sistem pengawasan intern pada kas

biasanya dilakukan pada penerimaan dan pengeluaran kas. Sumber penerimaan kas pada bank berasal dari penerimaan bunga kredit, penerimaan bunga piutang pada kanca, penerimaan jasa ATM dan pelayanan, penerimaan jasa transfer, sedangkan sumber pengeluaran kas pada bank berasal dari pembayaran listrik dan telepon, pembayaran bunga simpanan nasabah, pembayaran biaya promosi, pembayaran biaya pajak undian, dan pembayaran biaya operasional lainnya. Sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut harus dilakukan pengawasan melalui pencatatan harian untuk dapat melihat keabsahan dan kebenaran atas transaksi yang terjadi setiap hari didalam perusahaan itu.

Berdasarkan hasil laporan pertahun, pengawasan intern atas penerimaan dan pengeluaran kas yang baik dan sistematis pada bank yang bersangkutan mempunyai peranan yang sangat penting.

Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah Sistem pengawasan Intern atas Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Pulo Brayan Medan Sudah Dilaksanakan Sesuai Dengan Prinsip Akuntansi.

Permasalahan yang dihadapi perusahaan sangat banyak sehingga peneliti membatasinya agar masalahnya tidak terlalu luas cakupannya maka penelitian ini membahas mengenai "Sistem Pengawasan Intern Atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Pulo Brayan Medan".

Rumusan masalah dalam penelitian ini: "Bagaimana Sistem Pengawasan Intern atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Pulo Brayan Medan.

Hipotesis dijadikan dasar berpijak bagi peneliti sebagai jawaban sementara yang akan dibuktikan kebenarannya. Sebagaimana diketahui kata hipotesis berasal dari kata hipo yang artinya lemah dan tesis berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti

pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk belum dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Akuntansi.

Sistem dalam pengertian yang paling umum adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Kata sistem sendiri berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*systema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.

Pengertian Sistem menurut Mulyadi (2001:3) adalah: "(1). Setiap sistem terdiri dari unsur, (2). Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan, (3). Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem, (4). Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar".

Mengacu pada beberapa definisi sistem di atas, dapat juga diartikan, sistem adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai contoh, dalam sistem komputer terdapat *software* (perangkat lunak), *hardware* (perangkat keras), dan *brainware* (sumber daya manusia). Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Kas merupakan harta yang tersedia didalam satu perusahaan (dimiliki) oleh suatu perusahaan yang dapat segera dipergunakan untuk menunaikan segala kewajiban perusahaan. Dari defenisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang termasuk dalam kas bukian hanya terdiri dari uang tunai yang dimiliki oleh satu perusahaan tetapi semua harta yang dapat segera dipergunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Dengan demikian yang termasuk dalam kas adalah uang tunai, uang yang tersimpan dibank, tabungan yang setiap

waktu dapat diambil dari bank, giro, dan lain-lain. Menurut Harnanto (2002:84) “Kas merupakan alat pertukaran yang diakui oleh masyarakat umum, dan oleh sebab itu merupakan dasar landasan yang kuat untuk dipakai sebagai alat pengukur terhadap semua kegiatan ekonomi didalam perusahaan”.

Dari pengertian diatas tersebut bahwa kas meliputi uang tunai dan instrumen/alat-alat pembayaran yang diterima oleh umum, baik yang ada didalam perusahaan maupun yang disimpan dibank. Zaki Baridwan (2004:85) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kas adalah “Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi”. Didalam kegiatan operasional utama perusahaan sehari-hari akan mempengaruhi berapa besarnya penerimaan dan pengeluaran kas yang timbul akibat dari suatu transaksi. Dimana kas merupakan alat pertukaran yang menimbulkan adanya transaksi jual beli yang dilakukan perusahaan.

E. Kieso (2005:402) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kas adalah “Kas, harta yang paling *liquid* adalah media pertukaran baku dan dasar bagi pengukuran dan akuntansi untuk semua pos lainnya. Kas umumnya diklasifikasikan sebagai harta lancar. Agar dapat dilaporkan sebagai “kas”, pos bersangkutan harus siap tersedia untuk pembayaran kewajiban lancar, dan harus bebas dari setiap ikatan kontraktual yang membatasi penggunaannya dalam pemenuhan utang”.

Dari defenisi ini dinyatakan bahwa adanya suatu alat pertukaran standar yang selalu dipergunakan oleh setiap maupun setiap perusahaan dalam suatu transaksi yang terjadi. Kas yang mengakibatkan adanya transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan dicatatkan sebagai dasar pengukur

untuk setiap perkiraan dan pemakaiannya serta pengembaliannya tanpa ada batasan. Didalam Standar Akuntansi Keuangan (2002: PSAK No. 31, Paragraf 11, Seksi 31.3) dinyatakan bahwa “Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah”.

Uang yang dimaksud berupa asset yang harus dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya agar tercapai tujuan jangka panjang. Soemarso SR (2002:296) mengemukakan bahwa: “Kas adalah segala sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan Kas merupakan suatu alat yang dapat digunakan oleh setiap perusahaan dalam melakukan suatu transaksi dan peristiwa-peristiwa ekonomi.

Menurut Zaki Baridwan (2004:87) Kas memiliki sifat-sifat yang khusus, antara lain adalah :

1. Kas itu mempunyai fisik yang kecil.
2. Uang kas itu sukar menentukan pemilikinya.
3. Uang kas itu disukai oleh setiap orang.
4. Kas dapat dipergunakan sebagai alat pertukaran dalam setiap transaksi dan peristiwa ekonomi.

Dari sifat-sifat diatas maka biasanya uang kas tersebut selalu menjadi objek penyelewengan dan kalau sudah diselengkan biasanya sukar untuk menemukannya kembali. Oleh karena kas sangat mudah untuk diselewengkan, maka perusahaan harus merancang suatu Sistem Pengawasan Intern Atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang baik agar kinerja setiap tingkatan fungsional perusahaan tersebut dapat bekerja lebih efektif dan tidak ada penyimpangan terhadap asset perusahaan.

Didalam kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan sehari-hari, manajemen harus dapat bertanggung

jawab untuk melindungi dan mengamankan harta milik perusahaan demi tercapainya tujuan jangka panjang. Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, manajemen sering mendapatkan masalah-masalah khusus didalam kegiatan operasional perusahaan terutama pada kas. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perusahaan perlu merancang suatu pengawasan intern yang baik untuk membantu manajemen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Menurut T. Hani Handoko (2004:25) bahwa pengawasan intern adalah "Pengawasan (*controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif, pengawasan positif mencoba mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali".

Pengawasan yang ditetapkan merupakan suatu cara yang dirancang sedemikian rupa atau jalan keluar dan menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan.

Zaki Baridwan (2004:5) mengutip dari AICPA tentang pengertian pengawasan intern dalam arti yang luas sebagai berikut: "Pengawasan intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi didalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu".

Tanggung jawab untuk menyusun suatu sistem pengawasan intern tersebut terletak pada manajemen, begitu juga halnya dengan kegiatan mengawasi

sistem pengendalian intern. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan sistem pengawasan intern yang baik itu akan berguna untuk menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi dan membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001: PSAK No. 300, Paragraf 06, Seksi 319,2) yang menyatakan bahwa "Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

1. Keandalan pelaporan keuangan.
2. Efektifitas dan efisiensi operasi.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku".

Memurut Mulyadi (2001:163) Sistem pengawasan intern meliputi semua sarana, alat dan peraturan yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk :

1. Mengamankan dan mencegah terjadinya pemborosan, penyalahgunaan dari sumber-sumber ekonomi yang dipunyai perusahaan.
2. Menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya kebenaran data akuntansi dan yang dihasilkan.
3. Mendorong tercapainya dan dipatuhinya efisiensi operasi serta dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Pengawasan intern yang dirancang sedemikian rupa bukan semata-mata untuk mendeteksi adanya kesalahan data, tetapi lebih mengutamakan pada usaha-usaha pencegahan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan.

Tujuan Pengawasan Intern

Pengawasan intern yang dirancang oleh manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan diutamakan pada usaha untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan

penyalahgunaan. Kegiatan ini merupakan hal yang harus diterapkan oleh setiap perusahaan agar manajemen dalam merancang pengawasan intern dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Mulyadi (2001:68) berpendapat bahwa manajemen dalam merancang sistem pengendalian intern yang efektif dengan empat tujuan pokok yaitu:

a. Menjaga Kekayaan dan Catatan Organisasi

Banyak hal yang tidak diinginkan sering terjadi dengan sendirinya, terutama dalam halnya pada kegiatan operasional perusahaan atas kekayaan dan catatan yang merupakan dokumen rangkaian kegiatan transaksi dan rahasia dari perusahaan. Permasalahan pada kekayaan perusahaan sering terjadi, seperti halnya kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan, serta kekayaan yang bukan wujud fisik perusahaan seperti pada piutang dagang, akan rawan terhadap kecurangan. Untuk itu manajemen perlu membahas segala permasalahan tersebut dengan cara mencari tahu apa penyebab dari permasalahan tersebut berdasarkan bukti yang didapat secara konkrit, relevan dan andal melalui catatan dan dokumen atas transaksi perusahaan serta informasi dari pegawai yang bersangkutan. Dari kegiatan tersebut maka tugas manajemen adalah menjaga kekayaan dan catatan-catatan penting perusahaan untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan.

b. Mengecek Ketelitian dan Keandalan Data Akuntansi

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen

sebagai dasar pengambilan keputusan penting. Pengawasan intern dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal. Oleh karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan, maka ketelitian dan keandalan data akuntansi merefleksikan pertanggungjawaban penggunaan kekayaan perusahaan.

c. Mendorong Efisiensi

Pengawasan intern ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan usaha perusahaan, dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien. Efisiensi dalam struktur organisasi perusahaan juga perlu dilakukannya suatu pengawasan intern agar dapat mencegah terjadinya pekerjaan rangkap/ganda oleh setiap pegawai.

d. Mendorong Dipatuhinya Kebijakan Manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen harus dapat menetapkan suatu kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur sebagai pedoman atau langkah yang dapat diperhatikan oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Suatu cara agar kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen dapat lebih mudah dipahami, maka manajemen terlebih dahulu mengarahkan arus dokumen dalam prosedur dan bagaimana pekerjaan yang harus dilakukan pada setiap prosedur. Oleh sebab itu pengawasan intern ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan

manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan.

Unsur-Unsur Sistem Pengawasan Intern

Manajemen akan dapat berhasil dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan demi mencapai tujuan, apabila manajemen dapat melakukan pengawasan yang baik. Pengawasan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh manajemen merupakan dasar yang dapat menunjukkan hubungan satu sama lainnya dari data yang diperoleh dan data yang telah dibuktikan.

Mulyadi (2001:70) mengemukakan bahwa pengawasan intern terdiri dari tiga unsur pokok yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengawasan intern bagi suatu perusahaan. Efektifitas sistem akuntansi dan prosedur pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan dalam lingkungan pengendalian.
2. Sistem akuntansi
Pengawasan intern terhadap sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu kesatuan usaha, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang kesatuan usaha.
3. Prosedur pengendalian
Suatu perusahaan memerlukan kebijakan dan prosedur untuk menyediakan jaminan tambahan bahwa tujuan perusahaan akan dapat tercapai. Prosedur pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang umumnya dilakukan untuk pemisahan tugas yang memadai, sebagai prosedur otorisasi yang memadai, sebagai perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup, untuk

pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan perusahaan, serta untuk pengecekan secara independen atas kinerja karyawan.

Pengawasan intern yang diterapkan oleh satu perusahaan pasti berbeda cara penerapannya dengan perusahaan lain, ini disebabkan oleh besarnya perusahaan dan luasnya kegiatan transaksi dan peristiwa ekonomi dalam kegiatan operasional utama perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan perlu mengetahui bahwa dalam mencapai suatu pengawasan intern yang memuaskan terlebih dahulu harus dapat memahami beberapa unsur-unsur pengawasan intern.

Zaki Baridwan (2004:14) mengemukakan bahwa suatu pengawasan intern yang memuaskan harus meliputi :

1. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat.
2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya.
3. Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi.
4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dari keempat elemen diatas merupakan unsur-unsur pokok dari suatu sistem pengawasan intern. Berikut ini akan dijelaskan lebih luas mengenai masing-masing elemen tersebut diatas yaitu sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat

Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda, ini disebabkan oleh berbagai hal seperti jenis, luas

perusahaan, dan banyaknya cabang. Untuk menyusun struktur organisasi perusahaan digunakan suatu dasar yang berguna yaitu pertimbangan bahwa organisasi itu adalah fleksibel dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa harus mengadakan perubahan total, penyusunan tersebut juga harus dapat menggambarkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas agar tidak terjadi overlap fungsi masing-masing bagian.

b. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya.

Menurut Zaki Baridwan (2004:16) susunan rekening yang baik harus dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Membantu mempermudah penyusunan laporan keuangan dan laporan lainnya dengan ekonomis.
2. Meliputi rekening yang diperlukan untuk menggambarkan dengan baik dan teliti hartamilik, utang, pendapatan, harga pokok dan biaya yang harus dirinci sehingga memuaskan dan berguna bagi manajemen dalam melakukan pengawasan.
3. Menguraikan dengan teliti dan singkat apa yang harus dimuat didalam setiap rekening.
4. Memberikan batas se jelas mungkin antara pos aktiva, modal, pendapatan dan biaya.
5. Membuat rekening kontrol apabila diperlukan.

c. Adanya Praktek-Praktek Yang Sehat

Praktek-praktek yang sehat dalam suatu perusahaan adalah apabila setiap pegawai dalam perusahaan

melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Praktek yang sehat ini harus berlaku untuk seluruh prosedur yang ada, sehingga pekerjaan suatu bagian akan langsung dicek oleh bagian lainnya. Pekerjaan pengecekan dapat terjadi bila struktur organisasi dan prosedur yang disusun itu sudah memisahkan tugas-tugas dan wewenang-wewenang sehingga tidak ada satu bagianpun dalam perusahaan yang mengerjakan suatu transaksi dari awal sampai akhir.

d. Pegawai Yang Cukup Cakap

Tingkat kecakapan pegawai dapat mempengaruhi sukses tidaknya suatu sistem pengendalian intern. Apabila sudah disusun struktur organisasi yang tepat, prosedur-prosedur yang baik tetapi tingkat kecakapan pegawai tidak memenuhi syarat-syarat yang diminta, bisa diharapkan bahwa sistem pengawasan intern juga tidak akan berhasil dengan baik.

Perusahaan dalam memilih pegawai harus melakukan berbagai langkah-langkah untuk menemukan sejauh mana tingkat kecakapan pegawai yang akan diterima. Pemilihan pegawai baru oleh suatu perusahaan tidak hanya melihat dari segi pendidikan yang tinggi, tetapi perlu dilihat dari segi kemampuan dan luasnya wawasan dan pengetahuannya.

Prinsip-Prinsip Pengawasan Intern

Suatu manajemen yang baik adalah terdapatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien. Manajemen dalam merancang pengawasan intern telah memahami berbagai tujuan dan unsur pengawasan intern, dalam hal selanjutnya maka manajemen akan membahas apa sebenarnya yang akan menjadi suatu prinsip dalam pengawasan intern.

Pada dasarnya pengawasan intern pada setiap perusahaan berbeda-beda, ini dapat dilihat dari besarnya masing-masing perusahaan dan luas operasinya. Tetapi pada hakekatnya setiap perusahaan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan intern yang sama. Prinsip ini digunakan dengan tujuan agar

mendapatkan sistem pengawasan intern yang baik dan lebih terarah.

A.L Haryono (2000:4) mengemukakan bahwa didalam menyusun suatu sistem pengawasan intern yang baik harus meliputi beberapa prinsip pengawasan intern yang akan diterapkan yaitu :

1. Penetapan tanggung jawab yang jelas.
2. Penyelenggaraan pencatatan yang memadai.
3. Pengasuransian kekayaan dan karyawan perusahaan.
4. Pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva.
5. Pemisahan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan.
6. Pemakaian peralatan mekanis (bila memungkinkan).
7. Pelaksanaan pemeriksaan secara independen.

Pengawasan Intern Atas Penerimaan Kas

Pada umumnya setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya dari kegiatan transaksi ekonomi dipengaruhi oleh tingkat penerimaan kas. Semakin tinggi jumlah penerimaan kas berarti akan meningkatkan laba perusahaan, oleh karena itu suatu keberhasilan atas tujuan yang diinginkan telah tercapai. Sebaliknya, jika penerimaan kas rendah (sedikit) maka kinerja perusahaan adalah buruk dan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang akan membuat perusahaan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu untuk menjamin suatu keberhasilan atas penerimaan kas, maka perusahaan perlu merancang suatu pengawasan intern atas penerimaan kas. Dalam hal ini pengawasan ditujukan pada kegiatan transaksi operasional perusahaan sehari-hari yang merupakan sumber penerimaan kas dari penerimaan uang tunai. Pengawasan ini dilakukan dengan cara menghitung kembali uang yang diterima oleh kasir atas transaksi kas masuk perusahaan.

K. Fred Skousen (2004:247) berpendapat bahwa karakteristik dari suatu sistem pengawasan kas adalah:

1. Menetapkan tanggung jawab secara khusus untuk menangani penerimaan kas.
2. Pemisahan dan pencatatan penerimaan kas.
3. Penyetoran seluruh kas yang diterima setiap hari.
4. Sistem voucer untuk mengendalikan pembayaran kas.
5. Audit internal pada selang waktu yang tak terduga.
6. Pencatatan ganda atas kas menurut bank dan pembukuan dengan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh seseorang diluar bagian akuntansi.

Dengan sedapat mungkin dalam menjalankan pengawasan intern yang efektif, perusahaan dapat banyak mengurangi peluang-peluang untuk pencurian, kehilangan dan kesalahan yang tidak disengaja dalam akuntansi.

Pengawasan Intern Atas Pengeluaran Kas

Pengawasan atas penerimaan kas merupakan hal yang penting bagi perusahaan, akan tetapi kecurangan atau penyelewengan biasanya jarang terjadi melalui transaksi penerimaan kas melainkan melalui pengeluaran kas atau dengan menggunakan faktur fiktif (palsu). Oleh karena itu pengawasan atas pengeluaran kas sama pentingnya atau bahkan kadang-kadang lebih penting dari pada penerimaan kas.

Untuk mengawasi pengeluaran kas, maka semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek. Kecuali apabila pengeluaran yang dilakukan relatif sedikit, maka perusahaan dapat melakukan pembayaran tersebut melalui kas kecil. Jika kewenangan untuk menandatangani cek didelegasikan kepada seseorang pegawai yang ditunjuk, maka pegawai tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pencatatan transaksi kas. Hal ini guna mencegah adanya kecurangan dalam pengeluaran kas yang tidak nampak dalam catatan akuntansi.

Adapun unsur-unsur yang terkait pada pengawasan intern atas pengeluaran kas tersebut diatas, maka perusahaan dapat membuat pengawasan intern yang baik. Disamping itu dengan adanya pengawasan intern yang baik, perusahaan juga harus menetapkan suatu prinsip yang harus diperhatikan dalam mengarahkan pengawasan intern ke tingkat yang efektif dan efisien.

2. METODE PENELITIAN

Yang menjadi lokasi penelitian untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Pulo Brayan Medan.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kasir. Dari keterangan diatas maka penulis mengambil sampel yaitu kasir PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Pulo Brayan Medan.

Dalam usaha mengumpulkan data dan informasi digunakan 2 jenis metode penelitian yaitu :

a. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian perpustakaan adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, bahan kuliah, majalah-majalah yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari perusahaan. Penelitian ini dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu :

- a. Observasi
Mengadakan pengamatan pada objek penelitian berupa bahan tertulis maupun bahan lain yang dapat dilihat dari praktek lapangan.
- b. Interview
Mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan atau

pegawai yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap persediaan data-data yang menyangkut laporan keuangan perusahaan.

- c. Dokumentasi adalah data dokumen diperoleh dari objek penelitian seperti laporan keuangan, Struktur .

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Metode analisis deskriptif

Metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran mengenai Sistem Pengawasan Intern Atas Penerimaan dan Pengeluaran.

2. Metode Analisis Deduktif

Metode dengan memberikan gambaran yang jelas tentang penyebab timbulnya masalah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang telah dijelaskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Pengawasan Intern Atas Penerimaan Kas

Sistem pengawasan intern kas yang dilakukan oleh Perusahaan, seperti yang telah diuraikan diatas terbagi atas dua bagian yaitu pengawasan intern atas penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam penerimaan kas, sistem pengawasan intern yang dilakukan adalah dengan menugaskan bagian kasir untuk menerima uang dan menyimpan uang tersebut ditempat yang disediakan atau sering disebutkan dalam istilah *cash box*.

Kasir di bank ini terdiri dari dua orang dengan tujuan agar seluruh pekerjaan yang rumit dapat berkurang. Apabila salah satu dari teller berhalangan, maka teller yang satunya lagi akan menggantikan posisinya.

Dengan demikian sistem pengawasan intern kas yang dilakukan oleh unit ini telah menunjukkan pengawasan intern yang sesuai dengan prinsip pengawasan intern kas yang baik, sehingga tidak akan mungkin terjadi suatu penyelewengan terhadap kas.

Dari uraian sebelumnya sudah terlihat bahwa sistem pengawasan intern kas yang dilakukan sudah efektif. Hal ini menunjukkan pemeriksaan atas kebenaran jumlah uang yang diterima sesuai dengan tabungan pemilik telah diberikan tapak validasi yang sesuai, dan kemudian diberi *check list* oleh teller di samping tapak validasi tersebut. Setelah itu teller memberikannya kepada Costumer Service untuk melakukan verifikasi awal atas kebenaran setoran penerimaan kas dari teller, selanjutnya diserahkan kepada Ka.unit untuk melakukan verifikasi akhir. Apabila verifikasi telah selesai, maka setoran tersebut diserahkan kepada Costumer Service untuk pengarsipan.

Pada saat akhir hari jam kerja, seluruh bukti transaksi dikumpulkan untuk diperiksa kembali. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan adanya kelebihan dan kekurangan kas, maka harus dicari apa penyebabnya. Biasanya kelebihan atau kekurangan kas itu maksimal Rp. 1.000,-, lebih dari ketentuan itu maka telah terjadi hal yang tidak diinginkan dan harus dibayarkan oleh petugas yang bersangkutan. Penyebab kekurangan dan kelebihan ini harus dapat ditemukan pada hari itu juga. Jika tidak dapat ditemukan penyebabnya maka tidak boleh dilakukan penutupan buku daftar mutasi hariannya.

Sistem pengawasan intern pada kas perusahaan belum begitu efektif diterapkan. Hal ini dapat dilihat pada saat verifikasi seluruh transaksi telah selesai dilakukan, yang menyimpan seluruh uang ke brankas adalah bagian teller tetapi yang melakukan pencatatannya adalah Costumer Service. Apabila dilihat dari prinsip pengawasan intern yang telah dibahas sebelumnya, tugas teller ini sangat bertentangan

karena dia yang melakukan penyimpanan ke brankas.

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam melakukan pengawasan intern kas di bank ini seharusnya menyesuaikan sistem pengawasan intern kas yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan intern kas yang baik dan benar.

Adapun prinsip-prinsip sistem pengawasan intern tersebut adalah :

1. Tanggung jawab atas pelaksanaan setiap tugas harus ditetapkan, pada hal ini jika dilihat dari struktur organisasi Perusahaan telah menunjukkan adanya penetapan tugas. Namun ada kalanya suatu waktu tertentu dapat di ubah menurut tingkat kerumitan kegiatan operasionalnya.
2. Bagian pencatatan, bagian penerimaan kas, dan bagian penyimpanan kas harus dipisahkan. Dalam hal ini bank ini telah melakukannya, tetapi bagian penyimpanan dan penerimaan kas dilakukan oleh bagian teller.
3. Pemilihan karyawan secara efektif dan lebih terlatih. Perusahaan ini telah melakukan pemilihan karyawan secara efektif, ini dapat dilihat pada saat penerimaan karyawan baru dilakukan secara cermat dan di beri pelatihan khusus.

Analisis Sistem Pengawasan Intern Atas Pengeluaran Kas

Sistem pengawasan intern atas pengeluaran kas pada Perusahaan juga menetapkan tugas dalam transaksi pengeluaran kas pada bagian teller sedangkan untuk pencatatannya diberikan kepada Costumer Service.

Sistem pengawasan intern telah berlangsung secara efektif sesuai dengan sistem pengawasan intern yang telah diuraikan sebelumnya. Setiap pengeluaran kas oleh perusahaan harus diawasi dengan seksama guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada prosedur pengeluaran kas telah diuraikan bagaimana sebenarnya pengeluaran kas yang efektif. Seperti pada halnya pada pembayaran-

pembayaran biaya operasional perusahaan, apabila biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah yang tidak begitu besar maka pencairannya harus berdasarkan persetujuan Ka.unit. Apabila biaya yang harus dibayarkan dalam jumlah yang besar, maka *Costumer Service* meminta persetujuan kepada yang berwenang di kantor cabang.

Pada saat pengeluaran uang, teller harus memeriksa kuitansi pembayaran biaya tersebut apakah tanda tangannya sudah lengkap. Apabila tanda tangannya sudah lengkap yaitu tanda tangan *signer, checker, dan maker*, maka *teller* dapat memberikan uangnya sesuai jumlah yang tertera di kuitansi tersebut. Dari uraian kegiatan tersebut, maka sudah tampak bahwa pada saat pengeluaran kas oleh unit ini juga diawasi oleh pihak cabang yang diberikan wewenang khusus. Kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan dan hal yang tidak diinginkan dapat berkurang, karena yang melakukan pengawasan bukan hanya pihak unit saja tetapi jika pengeluaran yang besar diawasi oleh pihak cabang.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi Perusahaan pada dasarnya telah menggambarkan pemisahan fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas. Namun dalam prakteknya ditemukan adanya penyimpangan yaitu bagian teller merangkap dalam tugas penyimpanan, penerimaan, dan pengeluaran kas perusahaan tersebut.
2. Pada saat penghitungan akhir jam kerja sering ditemukan adanya kekurangan dan kelebihan kas yang dikarenakan oleh kelalaian dan kesalahan petugas yang bersangkutan.
3. Sistem Pengendalian penerimaan dan pengeluaran baik belum tentu menjadikan pengawasan intern yang baik jika tidak dibarengi

dengan kecakapan dan keahlian setiap pegawai.

4. Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik maka setiap bagian harus mengetahui tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

5. REFERENSI

- Baridwan Zaki, 2004 *Intermediate Accounting*, Edisi Ketujuh, Cetakan Kedua : BPFE, Yogyakarta.
- _____, *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*, 2004 Edisi Kelima, cetakan Kelima, BPFE, Yogyakarta,
- Harnanto, *Akuntansi Keuangan Intermediate*, 2002 Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, 2001 Edisi Kesatu, Cetakan Ketiga : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Jusuf AL Haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi*, 2000. Jilid Dua, Edisi Keempat, Cetakan Kedua : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kieso Donald E Dan Weygant, Jerry J, 2005. *Intermediate Accounting*, 7th Edition, *Akuntansi Intermediate*, Alih Bahasa : Herman Wibowo, Jilid Satu, Edisi Kesepuluh, Cetakan Pertama : Binarupa Aksara, Jakarta,.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian*, Cetakan Ketujuh : Alfabeta, Bandung.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga : Salemba Empat, Jakarta.

- Skousen, K.Fred, et. Al., *Intermediate Accounting*, 15th Edition, *Akuntansi Intermediate*, 2004. Editor : Barlev Nicodemus, Buku Satu, Edisi kelima Belas: Salemba Empat, Jakarta.
- Soemarso SR, 2002. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Buku Satu, Edisi Kelima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- T. Hani Handoko, 2004. *Manajemen, Edisi Kedua*, Cetakan Ketiga Belas, Penerbit BPFE, Yogyakarta.